



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 112 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 87 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN CIKAJANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 87 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Cikajang Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 87 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Cikajang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 87 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Cikajang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 87);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 87 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN CIKAJANG TAHUN 2023.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 87 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Cikajang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 87) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 112

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 112 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 87
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
KERJA KECAMATAN CIKAJANG
TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang penyusunannya harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 dalam Renstra, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Renja Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut Tahun 2023 selanjutnya menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja (Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Berdasarkan pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi

pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Renja berkenaan;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- c. Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dalam rangka pelayanan dasar masyarakat, pemenuhan belanja daerah yang bersifat mengikat dan bersifat wajib.

Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan Tema Pembangunan “Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat” telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD selanjutnya dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Perubahan APBD. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Muatan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 agar perlu memperhatikan diantaranya Program dan Kegiatan yang diperlukan serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2023, Kemampuan keuangan Daerah melalui APBD, mengakomodir pendanaan DAK dan APBD Provinsi, memuat target kinerja yang sudah ditetapkan pada Perubahan Renstra diantaranya Program prioritas, program unggulan, program mendesak dan SPM. Perencanaan perubahan difokuskan pada pergeseran pagu kegiatan, sub kegiatan dan kode rekening belanja, perubahan target kinerja, pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.

1.2. Dasar Hukum Perubahan Renja Tahun 2023

Landasan hukum dalam penyusunan perubahan Renja Tahun 2023 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

- Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

- tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun

- 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
 31. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut

(Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);

32. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

33. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36).

1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Tahun 2023

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perlu dilakukan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 87 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Cikajang Tahun 2023, sebagai pedoman penyusunan KUPA – PPASP Kabupaten Garut Tahun 2023 untuk menyusun perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Renja Tahun 2023 adalah untuk :

- a. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;

- b. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2023;
- c. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
- d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cikajang Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Perubahan Renja Tahun 2023

Memuat penjelasan tentang latar belakang dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

1.2 Dasar Hukum Perubahan Renja Tahun 2023

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Tahun 2023

1.3.1 Maksud

Memuat penjelasan tentang maksud dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.3.2. Tujuan

Memuat penjelasan tentang tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

- 2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintahan Daerah serta Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi, Tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah serta Program, Kegiatan dan Sub kegiatan, lokasi serta sasaran perubahan kelompok penerima manfaat, dan pagu perubahan renja tahun 2023.

- 3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Sebelum dan Sesudah Perubahan
- 3.2. Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Semula dan Menjadi.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Cikajang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja dan daya serap anggaran. Evaluasi Rencana Kerja dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan Renstra dan RKPD, berdasarkan pagu dan realisasi Renstra serta RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, serta rata-rata capaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan rata-rata capaian Renja pada Triwulan II Tahun 2023.

Konsistensi RKPD dan APBD akan berdampak pada jumlah realisasi anggaran. Program/kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD tidak menjadi capaian RKPD atau Renja. Oleh karena itu, apabila masih ada inkonsistensi program/kegiatan antara perencanaan dan penganggaran, maka realisasi anggaran dokumen rencana akan menjadi tidak sama dengan jumlah realisasi dokumen anggaran. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cikajang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Cikajang selama tahun 2022 dan tahun berjalan yaitu Tahun 2023 serta perkiraan target anggaran di Tahun 2024.

Upaya pencapaian kinerja tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan tidak dapat dilepaskan dari pencapaian kinerja Program dan Kegiatan. Kecamatan Cikajang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sepanjang Tahun 2023 melaksanakan 6 program dengan rata-rata capaian kinerja Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II mencapai 54,01%, dan rata-rata tingkat capaian terhadap target akhir Renstra sebesar 68,08%, yang mencakup 15 kegiatan dan 39 sub kegiatan.

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Cikajang Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Cikajang Tahun 2019-2024 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Cikajang Sampai dengan Tahun 2023
Kabupaten Garut

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan							
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	
1	7.01.7.0 1.10.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	500	13.556.447.071	93,64%	3.651.771.010,00	100%	2.139.189.479	28,07	600.430.588	38,12	815.352.858				
1	7.01.7.0 1.10.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	500	96.099.200	100%	5.661.000,00	100%	43.880.000	32,31	14.178.900	37,33	16.378.900				
	7.01.7.0 1.10.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	108	58.599.200	100%	5.661.000,00	100%	15.000.000,00	16,46	2.469.400	16,46	2.469.400				
	7.01.7.0 1.10.01. 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	7.500.000	99,90%	9.651.000,00	100%	16.000.000,00	19,98	3.197.500	19,98	3.197.500				
	7.01.7.0 1.10.01. 2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	7.500.000	0%	-	100%	5.000.000,00	93	4.650.000	93	4.650.000				
	7.01.7.0 1.10.01. 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	6	7.500.000	0%	-	100%	5.000.000,00	19,64	982.000	63,64	3.182.000				

		kinerja dan Iktisar Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
	7.01.7.0 1.10.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Cikajang)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	7.500.000	0%	-	100%	2.880.000,00	100	2.880.000	100	2.880.000				
2	7.01.7.0 1.10.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	500	7.899.809.970	92%	1.471.387.792,00	100%	1.582.102.979,00	17,87	282.790.971	48,77	771.532.384				
	7.01.7.0 1.10.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	7.854.225.570	92%	1.463.757.292,00	100%	1.571.839.279,00	17,91	281.500.971	48,63	764.347.384				
	7.01.7.0 1.10.01. 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Kecamatan Cikajang)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0				100%	3.370.000,00		1.290.000		2.935.000				
	7.01.7.0 1.10.01. 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	108	45.584.400	100%	7.630.500,00	100%	6.893.700,00	-	-	61,65	4.250.000				
3	7.01.7.0 1.10.01. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	500	7.500.000	100%		100%	4.250.000,00	576,66	24.508.000	576,66	24.508.000				
	7.01.7.0 1.10.01. 2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	6	7.500.000	100%		100%	4.250.000,00	83,29	3.540.000	100	4.250.000				

			SKPD														
4	7.01.7.0 1.10.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian di Kecamatan	500	120.750.000	100%	30.029.400,00	100%	37.573.900,00	65,23	24.508.000	65,23	24.508.000				
	7.01.7.0 1.10.01. 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	75	120.750.000	100%	30.029.400,00	100%	24.508.000,00	100	24.508.000	100	24.508.000				
	7.01.7.0 1.10.01. 2.05.02	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Kecamatan Cikajang)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0		100%		100%	4.770.000,00	65,56	3.127.000		3.477.000				
	7.01.7.0 1.10.01. 2.05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kecamatan Cikajang)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	30.000.000	100%		100%	4.280.000,00	-	-		-				
	7.01.7.0 1.10.01. 2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	6.000.000	0%	-	100%	4.015.900,00	-	-	-	-				
5	7.01.7.0 1.10.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	500	1.821.184.531	100%	163.923.700,00	100%	111.307.100,00	25,63	28.526.600	37,79	42.066.400				
	7.01.7.0 1.10.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	15	98.336.600	100%	6.593.000,00	100%	30.000.000,00	24,82	7.447.200	34,34	10.302.600				
	7.01.7.0 1.10.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	206	338.633.531	100%	20.032.100,00	100%	36.670.000,00	28,69	10.521.400	39,99	14.662.800				

7.01.7.0 1.10.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	223816	93.036.700	100%	12.366.900,00	100%	10.000.000,00	27,84	2.784.400	46,64	4.664.400				
7.01.7.0 1.10.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4700	32.410.800	100%	7.385.000,00	100%	8.000.000,00	24,38	1.950.000	40,63	3.250.000				
7.01.7.0 1.10.01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6000	330.000.000	100%	24.000.000,00	100%	10.000.000,00	29,93	2.992.500	50,93	5.092.500				
7.01.7.0 1.10.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	299.880.000	100%	5.600.000,00	100%	6.637.100,00	42,66	2.831.100	61,69	4.094.100				
7.01.7.0 1.10.01. 2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6	150.000.000	0%	-	100%	10.000.000,00	-	-	-	-				
7.01.7.0 1.10.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500	3.147.854.300	99,77%	193.655.650,00	0%	50.000.000,00	-	-	-	-				
7.01.7.0 1.10.01. 2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3	44.992.000	96%	69.404.000,00										
7.01.7.0 1.10.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	600.000.000	100%	49.853.300,00	0%	50.000.000,00	-	-	-	-				
7.01.7.0 1.10.01. 2.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	2.000.000.000	94%	1.790.458.138,00										
7.01.7.0 1.10.01. 2.05	Pengadaan Mebeul	Jumlah Pengadaan Mebeul	17	193.497.300	100%	74.398.350,00	0%	-	-	-	-	-				

6	7.01.7.0 1.10.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	500	333.733.870	89%	44.199.030,00	100%	34.102.800,00	24,44	8.333.717	38,44	13.109.799				
	7.01.7.0 1.10.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	28.500.000	67%	14.551.330,00	100%	-				-				
	7.01.7.0 1.10.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	28.650.000	100%		100%	22.000.000,00	19,54	4.299.217	32,3	7.105.199				
	7.01.7.0 1.10.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10	184.069.150	100%	29.647.700,00	100%	12.102.800,00	33,34	4.034.500	49,61	6.004.600				
7	7.01.7.0 1.10.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500	499.395.200	93,75%	38.511.600,00	100%	275.972.700,00	85,31	235.425.400	91,47	252.427.300				
	7.01.7.0 1.10.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	58	112.151.600	93%	14.610.500,00	100%	16.000.000,00	30,34	4.854.400	39,41	6.305.900				
	7.01.7.0 1.10.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kecamatan Cikajang)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	5	211.770.000	93%	16.141.500,00	100%	16.000.000,00	22,5	3.600.000	28,75	4.600.000				

			Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
	7.01.7.0 1.10.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	175.473.600			100%	243.972.700,00	93,03	226.971.000	99	241.521.400				
2	7.01.7.0 1.10.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	500	1.876.607.300	96%	222.391.200,00	100%	322.489.100,00	6,99	22.555.400	18,58	59.925.000				
8	7.01.7.0 1.10.02. 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	500	213.582.500	96%	220.103.718,00	100%	122.914.800,00	13,57	16.673.400	24,32	29.895.900				
	7.01.7.0 1.10.02. 2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kecamatan Cikajang)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			96%	47.990.000,00	100%	4.369.800,00	67,05	2.930.000	96,11	4.200.000				
	7.01.7.0 1.10.02. 2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Keempatn Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Monitoring	60	213.582.500			100%	118.545.000,00	11,59	13.743.400,00	21,68	25.695.900				

			Program BPNT, Kegiatan Penyelenggaraan Kepemudaan dan Olah Raga).														
	7.01.7.0 1.10.02. 2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0		100%	172.113.718,00	-	-	-	-	-	-				
9	7.01.7.0 1.10.02. 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	500	1.261.340.800	100%	25.000.000,00	-	199.574.300,00	21,6	43.102.456	42,55	84.921.481	-			
	7.01.7.0 1.10.02. 2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan (Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan)	500	1.261.340.800	100%	25.000.000,00	100%	199.574.300,00	21,6	43.102.456	42,55	84.921.481				
	7.01.02. 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	500	401.684.000												
	7.01.02. 2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dgn Kewenangan Lain		35	401.684.000												

		yang Dilimpahkan															
3	7.01.7.0 1.10.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Masyarakat Desa/ Kelurahan Yang Dapat Diberdayakan	500	315.576.500	100%	6.710.800,00	100%	65.532.300,00	6,61	4.330.800	29,5	19.330.800				
1 0	7.01.7.0 1.10.03. 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	14		100%	28.111.500,00	100%	15.000.000,00	28,87	4.330.800	28,87	4.330.800				
	7.01.7.0 1.10.03. 2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2		100%	16.727.500,00	100%	4.330.800,00	100	4.330.800	100	4.330.800				
	7.01.7.0 1.10.03. 2.01.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	2		100%	11.384.000,00	0%	-	-	-	-	-				
1 1	7.01.7.0 1.10.03. 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	500	139.871.000	100%	-	100%	10.000.000,00	26,59	2.659.400	54,69	5.469.400				
	7.01.7.0 1.10.03. 2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan Cikajang)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	14	139.871.000	0%	-	0%	10.000.000,00	-	2.659.400	-	5.469.400				
1 2	7.01.7.0 1.10.03. 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat			0%	-	100%	28.952.300,00	-	-	-	-				

			(PPKM)														
	7.01.7.0 1.10.03. 2.05.02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan			0%	-	100%	28.952.300,00	-	-	-	-				
1 3	7.01.7.0 1.10.03. 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	500	175.705.500	0%	-	100%	11.580.000,00	53,99	6.252.600	53,99	6.252.600				
	7.01.7.0 1.10.03. 2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Laporan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	23	175.705.500	0%	-	100%	11.580.000	53,99	6.252.600	53,99	6.252.600				
4	7.01.7.0 1.10.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Penanganan Gangguan Trantibum	500	246.932.200	100%	46.078.800,00	100%	70.800.100,00	16,33	11.558.700	40,85	28.921.300				
1 4	7.01.7.0 1.10.04. 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0		100%	46.078.800,00	100%	70.800.100,00								
	7.01.7.0 1.10.04. 2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	300	80.012.100	100%	31.728.500,00	100%	30.850.100,00	14,59	4.500.000,00	24,31	7.500.000				

			Kecamatan														
	7.01.7.0 1.10.04. 2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	60	150.000.100	0%	14.350.300,00	100%	39.950.000,00	10,61	4.240.000	50,16	20.039.600				
1 3	7.01.7.0 1.10.04. 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	500	221.012.200	100%		100%									
	7.01.7.0 1.10.04. 2.02.01	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	60	221.012.200	100%		100%									
5	7.01.7.0 1.10.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	500	824.000.000	100%	199.980.000,00	100%	213.250.000,00	26,88	57.327.200	44,84	95.627.200				
1 3	7.01.7.0 1.10.05. 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	500	824.000.000	100%	199.980.000,00	100%	213.250.000,00	26,88	57.327.200	44,84	95.627.200				

		Penugasan Kepala Daerah	Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah													
	7.01.7.0 1.10.05. 2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	4	24.000.000	100%	25.089.500,00	100%	13.250.000,00	-	-	2,64	350.000			
	7.01.7.0 1.10.05. 2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Kecamatan Cikajang) PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	800.000.000	100%		100%	200.000.000,00	28,66	57.327.200	47,64	95.277.200			
6	7.01.7.0 1.10.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Desa Berkinerja Baik	500	151.754.000	100%		100%	20.000.000,00	114,51	22.901.000	221,77	44.353.200			
1 4	7.01.7.0 1.10.06. 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Laporan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	500	151.754.000	100%		100%	20.000.000,00	5,6	1.120.000	100	20.000.000			

		Pemerintahan Desa	Pengawasan Pemerintahan Desa														
7.01.7.0	1.10.06.	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	60	151754000	0%	-	100%	20.000.000,00	5,6	1.120.000	100	20.000.000				
2.01.03						#	4.146.045.028,00	100%	2.831.260.979,00	25,4	719.103.688	37,56	1.063.510.358				

2.1. 2. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Cikajang adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi atau UPT/UPTD dan elemen masyarakat. Sesuai dengan Visi dan Misi Kecamatan Cikajang yang salah satunya poin penting untuk Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan aparatur yang handal disiplin kreatif dan inovatif dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Pengukuran Indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Cikajang berdasarkan pedoman pengukuran Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah. Pada unit kerja setingkat eselon III SKPD / Unit kerja mandiri sekurang – kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Cikajang disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

Pelaksanaan Kegiatan Kecamatan Cikajang bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/UPT/UPTD diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2019 – 2024 yaitu terciptanya system pemerintahan yang baik dan demokrasi. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Cikajang dalam mendukung keberhasilan pembangunan 2019 – 2024 sebagai mana tercantum dalam RPJMD.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Kabupaten Garut perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap pembangunan kabupaten garut secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian oprasionalisasi dan berkaitan terhadap peran Misi yang telah ditetapkan, secara umum terdapat 4 (empat) tujuan dasar dalam pembangunan Kabupaten Garut dalam 5 (lima) tahun mendatang yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kehidupan Masyarakat Yang Berdasarkan Nilai – Nilai Agama dan Sosial. Meningkatkan SDM dan kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai – nilai sosial dan agama merupakan tugas utama pemerintah.

Kualitas hidup masyarakat oleh UNDP diukur dengan pendidikan, Indeks Kesehatan dan indeks prioritas daya beli. Untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat diperlukan adanya sinkronisasi dan harmonisasi program dari seluruh satuan kerja yang ada.

2. Meningkatkan Perekonomian Yang Ada dan Daya Saing Daerah Menuju Kemandirian Ekonomi.

Meningkatnya perekonomian daerah akan mendorong stabilitas perekonomian daerah. Ketidak stabilan perekonomian daerah akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya akan memberikan efek terhadap tingginya pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat. Tantangan terbesar Pemerintah daerah kedepan adalah bagaimana meningkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam mewujudkan kemandirian daerah, yang diikuti dengan pemerataan pendapatan dimasyarakat.

Peningkatan daya saing daerah, kebijakan dan strategi dan pembangunan daerah merupakan salah satu amanah dalam era otonomi daerah sebagai mana ditetapkan dalam Undang – Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, indikator keberhasilan meningkatnya daya saing daerah adalah peningkatan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri.

3. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Berkelanjutan.

Penyelenggara mengelola pemerintahan yang baik, bersih dan berkelanjutan kebutuhan bersama yang harus dicapai oleh pemerintah daerah. Untuk mewujudkan mengelola yang baik terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan pembenahan :

a. Mengupayakan semaksimal mungkin peran masyarakat dalam proses pembuatan keputusan.

b. Menegakan rule of law kekuatan hukum secara adil c.

Menciptakan transparansi dalam arus informasi

d. Membangun akuntabilitas publik dengan berusaha agresif keputusan harus dipertanggung jawabkan kepada publik dan lembaga – lembaga stakeholder.

e. Mengupayakan agar semua lembaga dan prosedur siaga dan tanggap dalam pelayanan setiap kebutuhan stakeholder Warga Negara. Seluruh komponen pemerintah harus mempunyai komitmen bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh komponen masyarakat.

- f. Mengelola lembaga pemerintah secara efektif dan efisien sehingga produk lembaga dan prosesnya dilaksanakan tepat sasaran dan hemat.
 - g. Setiap pemimpin mempunyai Visi yang strategis dalam mencapai Good governance dengan mengembangkan kualitas SDM masing – masing.
4. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan Sesuai Dengan Peruntukannya.

Pengelolaan sumber daya daerah yang berkelanjutan ditujukan dalam rangka memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan dan kegunaan sumber daya alam serta lingkungan hidup dengan tetap menjaga lingkungan fungsi daya dukung dan daya saing kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa depan. Melalui pemanfaatan yang serasi, pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan, kenyamanan kehidupan, pemeliharaan, pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

Indikator keberhasilan tujuan meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah penanganan lahan kritis yang dapat terjadi karena faktor alam dan manusia.

Lahan kritis dapat berupa tanah tandus ataupun hutan yang gundul, kondisi ini dapat mengakibatkan kurang produktif lahan dan pada tingkat yang lebih parah dapat menimbulkan bencana, tanah longsor, banjir dan kebakaran. Sebagian besar lahan kritis terjadi akibatnya ada alih fungsi hutan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Realisasi dan Evaluasi Program/Kegiatan Kecamatan Cikajang sampai dengan triwulan II tahun 2023 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Cikajang Tahun Anggaran 2023. Adapun Realisasi dan Evaluasi Program/Kegiatan Kecamatan Cikajang sampai dengan triwulan II tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Cikajang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran
1	2	8	9	10
7.01.7.01.12.01.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.139.189.479	1.123.499.783	52,52
7.01.7.01.12.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.880.000	16.378.900	37,33
7.01.7.01.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	2.469.400	16,46
7.01.7.01.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16.000.000	3.197.500	19,98
7.01.7.01.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	4.650.000	93,00
7.01.7.01.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	3.182.000	63,64
7.01.7.01.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.880.000	2.880.000	100,00
7.01.7.01.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.582.102.979	767.282.384	48,50
7.01.7.01.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.571.839.279	764.347.384	48,63
7.01.7.01.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.370.000	2.935.000	87,09
7.01.7.01.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.893.700	-	-
7.01.7.01.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.250.000	4.250.000	100,00
7.01.7.01.12.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.250.000	4.250.000	100,00
7.01.7.01.12.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.573.900	27.985.000	74,48
7.01.7.01.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	24.508.000	24.508.000	100,00
7.01.7.01.12.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4.770.000	3.477.000	72,89
7.01.7.01.12.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.280.000	-	-
7.01.7.01.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4.015.900	-	-
7.01.7.01.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	111.307.100	42.066.400	37,79
7.01.7.01.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	10.302.600	34,34
7.01.7.01.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.670.000	14.662.800	39,99
7.01.7.01.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	4.664.400	46,64

7.01.7.01.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000	3.250.000	40,63
7.01.7.01.12.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	10.000.000	5.092.500	50,93
7.01.7.01.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.637.100	4.094.100	61,69
7.01.7.01.12.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000	-	-
7.01.7.01.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.000.000	-	-
7.01.7.01.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	-	-
7.01.7.01.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.102.800	13.109.799	38,44
7.01.7.01.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.000.000	7.105.199	32,30
7.01.7.01.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.102.800	6.004.600	49,61
7.01.7.01.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.972.700	252.427.300	91,47
7.01.7.01.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.000.000	6.305.900	39,41
7.01.7.01.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.000.000	4.600.000	28,75
7.01.7.01.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	243.972.700	241.521.400	99,00
7.01.7.01.12.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	322.489.100	114.817.381	35,60
7.01.7.01.12.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	122.914.800	29.895.900	24,32
7.01.7.01.12.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4.369.800	4.200.000	96,11
7.01.7.01.12.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	118.545.000	25.695.900	21,68
7.01.7.01.12.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	199.574.300	84.921.481	42,55
7.01.7.01.12.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	199.574.300	84.921.481	42,55
7.01.7.01.12.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	65.532.300	26.722.000	40,78
7.01.7.01.12.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15.000.000	15.000.000	100,00

7.01.7.01.12.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.000.000	15.000.000	100,00
7.01.7.01.12.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	10.000.000	5.469.400	54,69
7.01.7.01.12.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	5.469.400	54,69
7.01.7.01.12.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	28.952.300	-	-
7.01.7.01.12.03.2.05.02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	28.952.300	-	-
7.01.7.01.12.03.2.06.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	11.580.000	6.252.600	53,99
7.01.7.01.12.03.2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	11.580.000	6.252.600	53,99
7.01.7.01.12.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	70.800.100	27.539.600	38,90
7.01.7.01.12.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	70.800.100	27.539.600	38,90
7.01.7.01.12.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30.850.100	7.500.000	24,31
7.01.7.01.12.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	39.950.000	20.039.600	50,16
7.01.7.01.12.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	213.250.000	200.350.000	93,95
7.01.7.01.12.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	213.250.000	200.350.000	93,95
7.01.7.01.12.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	13.250.000	350.000	2,64
7.01.7.01.12.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	200.000.000	200.000.000	100,00
7.01.7.01.12.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.000.000	20.000.000	100,00

7.01.7.01.12.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.000.000	20.000.000	100,00
7.01.7.01.12.06.2.01.06	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	20.000.000	20.000.000	100,00
JUMLAH		2.831.260.979	1.512.928.764	60,29

Sumber : Evaluasi Renja Triwulan II Tahun 2023

Dari tabel diatas, menggambarkan perbandingan pagu anggaran Tahun 2023 terhadap realisasi Tahun Anggaran 2023, dari total pagu anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 2.831.260.979,-, melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja Tahun 2023 dalam pelaksanaannya pada Tahun Anggaran 2023, sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.512.928.764,- atau sebesar 60,29%.

Capaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dapat diwujudkan. Berdasarkan data hasil evaluasi Renja Tahun 2023, diperoleh rata-rata tingkat capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Cikajang s.d. Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Realisasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan
Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								
						I		II		III		IV		
				Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	
1	2	3	4	7		8		9		10		11		
1	7.01.7.01.10.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	3.651.771.010,00	100%	2.139.189.479	28,07	600.430.588	38,12	815.352.858				
1	7.01.7.01.10.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.661.000,00	100%	43.880.000	32,31	14.178.900	37,33	16.378.900				
	7.01.7.01.10.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.661.000,00	100%	15.000.000,00	16,46	2.469.400	16,46	2.469.400				
	7.01.7.01.10.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.651.000,00	100%	16.000.000,00	19,98	3.197.500	19,98	3.197.500				
	7.01.7.01.10.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	100%	5.000.000,00	93,00	4.650.000	93,00	4.650.000				
	7.01.7.01.10.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	100%	5.000.000,00	19,64	982.000	63,64	3.182.000				
	7.01.7.01.10.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Cikajang)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100%	2.880.000,00	100,00	2.880.000	100,00	2.880.000				
2	7.01.7.01.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	1.471.387.792,00	100%	1.582.102.979,00	17,87	282.790.971	48,77	771.532.384				

	7.01.7.01.10.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.463.757.292,00	100%	1.571.839.279,00	17,91	281.500.971	48,63	764.347.384			
	7.01.7.01.10.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Kecamatan Cikajang)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		100%	3.370.000,00		1.290.000		2.935.000			
	7.01.7.01.10.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.630.500,00	100%	6.893.700,00	-	-	61,65	4.250.000			
3	7.01.7.01.10.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan		100%	4.250.000,00	576,66	24.508.000	576,66	24.508.000			
	7.01.7.01.10.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		100%	4.250.000,00	83,29	3.540.000	100,00	4.250.000			
4	7.01.7.01.10.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian di Kecamatan	30.029.400,00	100%	37.573.900,00	65,23	24.508.000	65,23	24.508.000			
	7.01.7.01.10.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30.029.400,00	100%	24.508.000,00	100,00	24.508.000	100,00	24.508.000			
	7.01.7.01.10.01.2.05.02	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Kecamatan Cikajang)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		100%	4.770.000,00	65,56	3.127.000		3.477.000			
	7.01.7.01.10.01.2.05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kecamatan Cikajang)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		100%	4.280.000,00	-	-		-			
	7.01.7.01.10.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	100%	4.015.900,00	-	-	-	-			
5	7.01.7.01.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	163.923.700,00	100%	111.307.100,00	25,63	28.526.600	37,79	42.066.400			

7.01.7.01.10.01.2.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6.593.000,00	100%	30.000.000,00	24,82	7.447.200	34,34	10.302.600			
7.01.7.01.10.01.2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20.032.100,00	100%	36.670.000,00	28,69	10.521.400	39,99	14.662.800			
7.01.7.01.10.01.2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12.366.900,00	100%	10.000.000,00	27,84	2.784.400	46,64	4.664.400			
7.01.7.01.10.01.2.06.0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7.385.000,00	100%	8.000.000,00	24,38	1.950.000	40,63	3.250.000			
7.01.7.01.10.01.2.06.0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.000.000,00	100%	10.000.000,00	29,93	2.992.500	50,93	5.092.500			
7.01.7.01.10.01.2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.600.000,00	100%	6.637.100,00	42,66	2.831.100	61,69	4.094.100			
7.01.7.01.10.01.2.06.1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	100%	10.000.000,00	-	-	-	-			
7.01.7.01.10.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.655.650,00	0%	50.000.000,00	-	-	-	-			
7.01.7.01.10.01.2.07.0 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	69.404.000,00									
7.01.7.01.10.01.2.07.0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.853.300,00	0%	50.000.000,00	-	-	-	-			

	7.01.7.01.10.01.2.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.790.458.138,00									
	7.01.7.01.10.01.2.05	Pengadaan Mebeul	Jumlah Pengadaan Mebeul	74.398.350,00	0%	-	-	-	-	-			
6	7.01.7.01.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44.199.030,00	100%	34.102.800,00	24,44	8.333.717	38,44	13.109.799			
	7.01.7.01.10.01.2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	14.551.330,00	100%	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-			
	7.01.7.01.10.01.2.08.0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100%	22.000.000,00	19,54	4.299.217	32,30	7.105.199			
	7.01.7.01.10.01.2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	29.647.700,00	100%	12.102.800,00	33,34	4.034.500	49,61	6.004.600			
7	7.01.7.01.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.511.600,00	100%	275.972.700,00	85,31	235.425.400	91,47	252.427.300			
	7.01.7.01.10.01.2.09.0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14.610.500,00	100%	16.000.000,00	30,34	4.854.400	39,41	6.305.900			
	7.01.7.01.10.01.2.09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kecamatan Cikajang)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16.141.500,00	100%	16.000.000,00	22,50	3.600.000	28,75	4.600.000			

	7.01.7.01.10.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100%	243.972.700,00	93,03	226.971.000	99,00	241.521.400			
2	7.01.7.01.10.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	222.391.200,00	100%	322.489.100,00	6,99	22.555.400	18,58	59.925.000			
8	7.01.7.01.10.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	220.103.718,00	100%	122.914.800,00	13,57	16.673.400	24,32	29.895.900			
	7.01.7.01.10.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kecamatan Cikajang)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	47.990.000,00	100%	4.369.800,00	67,05	2.930.000	96,11	4.200.000			
	7.01.7.01.10.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Keaktivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Monitoring Program BPNT, Kegiatan Penyelenggaraan Kepemudaan dan Olah Raga).		100%	118.545.000,00	11,59	13.743.400,00	21,68	25.695.900			
	7.01.7.01.10.02.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	172.113.718,00	-	-	-	-	-	-			
9	7.01.7.01.10.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	25.000.000,00	-	199.574.300,00	21,60	43.102.456	42,55	84.921.481			

	7.01.7.01.10.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan (Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan)	25.000.000,00	100%	199.574.300,00	21,60	43.102.456	42,55	84.921.481			
3	7.01.7.01.10.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Masyarakat Desa/ Kelurahan Yang Dapat Diberdayakan	6.710.800,00	100%	65.532.300,00	6,61	4.330.800	29,50	19.330.800			
10	7.01.7.01.10.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	28.111.500,00	100%	15.000.000,00	28,87	4.330.800	28,87	4.330.800			
	7.01.7.01.10.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.727.500,00	100%	4.330.800,00	100,00	4.330.800	100,00	4.330.800			
	7.01.7.01.10.03.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	Jumlah Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	11.384.000,00	0%	-	-	-	-	-			
11	7.01.7.01.10.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	-	100%	10.000.000,00	26,59	2.659.400	54,69	5.469.400			
	7.01.7.01.10.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat (Kecamatan Cikajang)	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	0%	10.000.000,00	-	2.659.400	-	5.469.400			
12	7.01.7.01.10.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	-	100%	28.952.300,00	-	-	-	-			
	7.01.7.01.10.03.2.05.02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	-	100%	28.952.300,00	-	-	-	-			
13	7.01.7.01.10.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	-	100%	11.580.000,00	53,99	6.252.600	53,99	6.252.600			

	7.01.7.01.10.03.2.06.0 1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Laporan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	-	100%	11.580.000	53,99	6.252.600	53,99	6.252.600			
4	7.01.7.01.10.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Penanganan Gangguan Trantibum	46.078.800,00	100%	70.800.100,00	16,33	11.558.700	40,85	28.921.300			
14	7.01.7.01.10.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	46.078.800,00	100%	70.800.100,00							
	7.01.7.01.10.04.2.01.0 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	31.728.500,00	100%	30.850.100,00	14,59	4.500.000,00	24,31	7.500.000			
	7.01.7.01.10.04.2.01.0 2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	14.350.300,00	100%	39.950.000,00	10,61	4.240.000	50,16	20.039.600			
13	7.01.7.01.10.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100%		#DIV/0!	-	#DIV/0!				
	7.01.7.01.10.04.2.02.0 1	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Pungsiya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		100%		#DIV/0!	-	#DIV/0!				
5	7.01.7.01.10.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Diiimpahkan Kepada Camat	199.980.000,00	100%	213.250.000,00	26,88	57.327.200	44,84	95.627.200			

13	7.01.7.01.10.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	199.980.000,00	100%	213.250.000,00	26,88	57.327.200	44,84	95.627.200			
	7.01.7.01.10.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.089.500,00	100%	13.250.000,00	-	-	2,64	350.000			
	7.01.7.01.10.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Kecamatan Cikajang) PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		100%	200.000.000,00	28,66	57.327.200	47,64	95.277.200			
6	7.01.7.01.10.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Desa Berkinerja Baik		100%	20.000.000,00	114,51	22.901.000	221,77	44.353.200			
14	7.01.7.01.10.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100%	20.000.000,00	5,60	1.120.000	100,00	20.000.000			
	7.01.7.01.10.06.2.01.03	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	100%	20.000.000,00	5,60	1.120.000	100,00	20.000.000			
				4.146.045.028,00	100%	2.831.260.979,00	25,40	719.103.688	37,56	1.063.510.358			

Sumber : Evaluasi Renja Triwulan II Tahun 2023

1. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - 1) Realisasi program yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Dari 6 (enam) program yang dilaksanakan Kecamatan Cikajang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, 5 Program kegiatan belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan 1 program kegiatan telah memenuhi target yang di rencanakan yaitu Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 20.000.000,-.
 - 2) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
Dari 14 (empat belas) kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Cikajang sampai dengan triwulan II Tahun 2023, ada 2 (dua) Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu sebagai berikut :
 - (1) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dari total anggaran sebesar Rp. 4.250.000,- realisasi sebesar Rp. 4.250.000,- atau (100%)
 - (2) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa total anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- realisasi sebesar Rp. 20.000.000,- atau (100%)
 - 3) Realisasi sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
Dari 38 (tiga puluh Delapan) sub kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Cikajang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, ada 6 (enam) Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu sebagai berikut :
 - (1) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari total anggaran sebesar Rp. 2.880.000,- realisasi sebesar Rp. 2.880.000,- atau (100%)
 - (2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada dari total anggaran sebesar Rp. 4.250.000,- realisasi sebesar Rp. 4.250.000,- atau (100%)
 - (3) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dari total anggaran sebesar Rp.24.508.000,- realisasi sebesar Rp. 24.508.000,-atau (100%)

- (4) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dari total anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- realisasi sebesar Rp. 15.000.000,- atau (100%)
- (5) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dari total anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- realisasi sebesar Rp. 200.000.000,- atau (100%)
- (6) Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dari total anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- realisasi sebesar Rp. 20.000.000,- atau (100%).

2. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Sampai dengan Triwulan II tahun 2023, di Kecamatan Cikajang tidak ada Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

3. Faktor-faktor penyebab belum tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan.

3.1 Faktor penyebab belum tercapainya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan masih dilaksanakan pada triwulan III dan IV sehingga belum terserap seluruhnya.
- 2) Adanya perubahan harga pasar sehingga untuk belanja barang dan belanja modal tidak terserap seluruhnya.
- 3) Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;

3.2 Faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan adalah dikarenakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana.

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cikajang adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cikajang tahun

2023 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Cikajang pada umumnya.

- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cikajang berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Cikajang.

5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab belum tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan

Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut di antara lain :

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.
- c. Perlu adanya percepatan penyerapan anggaran pada Triwulan III dan IV. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sampai dengan

Triwulan II Tahun 2023 :

1. Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program (Program 1 s.d. Program 6) adalah 60,29%.
2. Capaian Kinerja Dan Anggaran Paling Rendah Adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yaitu 35,60%
3. Capaian Kinerja Dan Anggaran Paling Tinggi Adalah Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yaitu 100 %
4. Faktor-faktor penyebab rendahnya capaian kinerja dan anggaran pada beberapa program diantaranya dikarenakan adanya program dan kegiatan tersebut masih dilaksanakan sampai dengan triwulan III dan IV.
5. Faktor-faktor penyebab tingginya capaian kinerja dan anggaran pada beberapa program diantaranya dikarenakan indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan perencanaan. Disamping itu sebagian besar indikator kinerja yang mencapai target

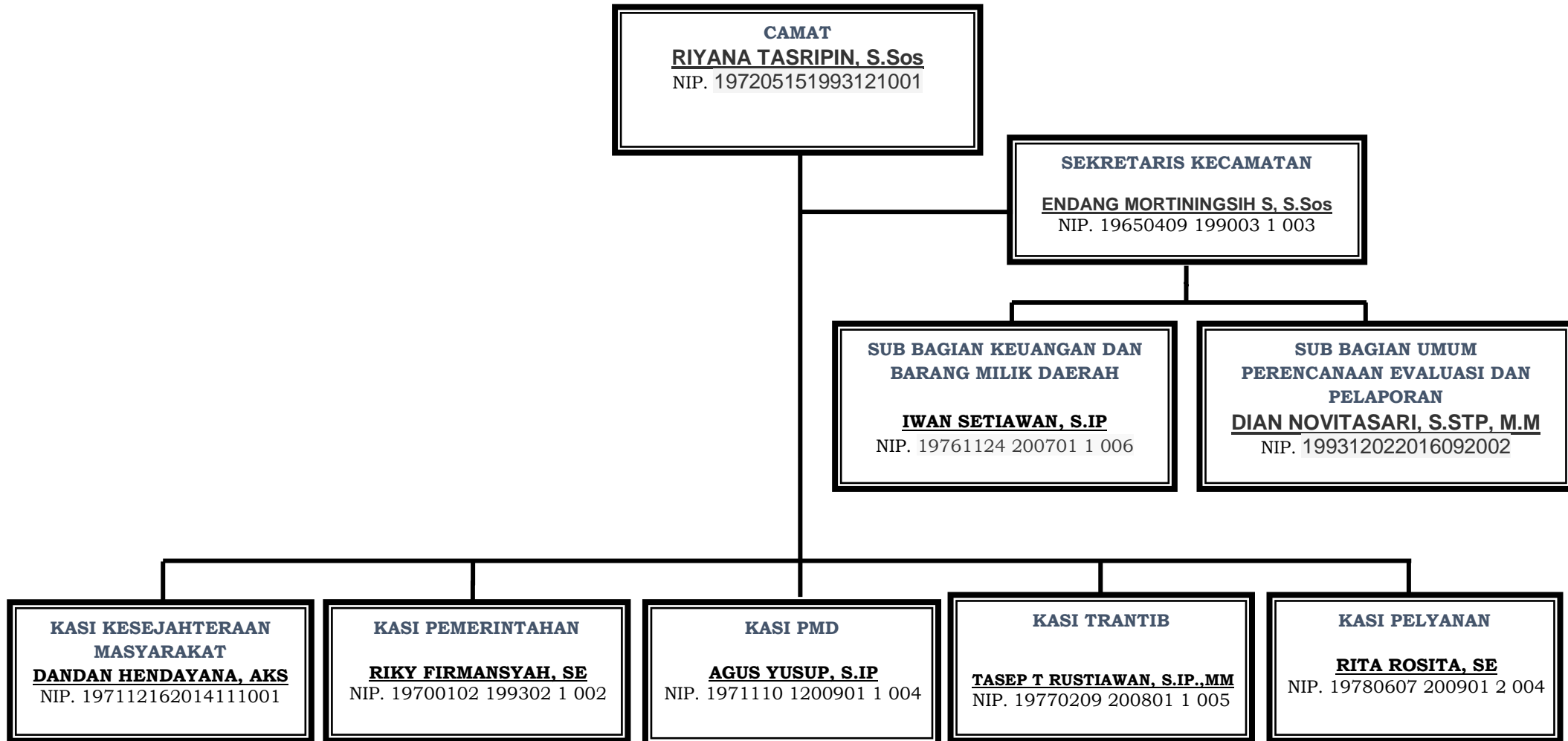
- dan melebihi target adalah indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
6. Implikasi yang timbul terhadap program yang capaian kinerja dan anggarannya masih rendah, perlu adanya percepatan pencairan anggaran untuk mencapai target sesuai dengan yang telah direncanakan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Kecamatan Cikajang sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cikajang Adapun tugas pokok dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235) maka perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator pelayanan masing masing sesuai tupoksi serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN CIKAJANG
PERBUP NO.27 TAHUN 2016



Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cikajang
Kabupaten Garut

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi Tahun			Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			(81)	(82)	(83)	(84)	80,14	82.2	84,14	86,16	82	83	84	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			-	70	75	80	-		70	75	70	75	80	
3	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan			-	90	95	100	-		90	90	90	95	100	
4	Predikat SAKIP Kecamatan			CC	B	B	B	CC	CC	B	B	B	B	BB	

Sumber : Pengolahan Data Kecamatan Cikajang Tahun 2023

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut sampai dengan Triwulan II tahun 2023, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut.

1. Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Desa,
2. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
3. Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
4. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat
5. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik
6. Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa
7. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.
8. Belum optimalnya penanggulangan AKI/AKB.
9. Belum optimalnya penanggulangan Stunting.
10. Belum optimalnya penguatan demokrasi.

Adapun hambatan dalam menanggulangi isu-isu strategis yang berkembang selama ini diantaranya :

1. Belum meratanya kemampuan SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan di tiap desa.
2. Penyerapan anggaran yang belum 100%.
3. Belum semua pegawai memahami Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP).
4. Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada.
5. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik.
6. Lemahnya pemahaman lembaga dan perangkat desa terhadap regulasi yang ada.
7. Keterbatasan lapangan pekerjaan.

8. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang AKI/AKB.
9. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang Stunting.
10. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang demokrasi

2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan Renja

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cikajang serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Cikajang berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Cikajang.

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2023 yang diusulkan Kecamatan Cikajang sebesar Rp. 2.820.994.435,-.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Cikajang diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan program. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023
Kecamatan Cikajang
Kabupaten Garut

Kode					Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan								
					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
7					UNSUR KEWILAYAHAN						UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01				KECAMATAN						2,820,994,435	KECAMATAN						2,820,994,435
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					100%	2,157,875,235	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					100%	2,157,875,235
7	01	01	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100%	43,880,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100%	43,880,000
7	01	01	2	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	15,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	15,000,000				
7	01	01	2	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	16,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	16,000,000				
7	01	01	2	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	5,000,000				
7	01	01	2	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	5,000,000				

7	01	01	2	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		2,880,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		2,880,000
7	01	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	1,571,838,735	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	1,571,838,735
7	01	01	2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	1,561,575,035	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	1,561,575,035
7	01	01	2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Dana Transfer Umum-Dana	Kab. Garut,	100%	3,370,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Dana Transfer Umum-Dana	Kab. Garut,	100%	3,370,000
					Keuangan SKPD (Kecamatan Cikajang)	Alokasi Umum	Cikajang, Cikajang	100%		Keuangan SKPD (Kecamatan Cikajang)	Alokasi Umum	Cikajang, Cikajang	100%	
7	01	01	2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	6,893,700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	6,893,700
7	01	01	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100%	4,250,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100%	4,250,000
7	01	01	2	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		4,250,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	4,250,000
7	01	01	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	37,573,900	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	37,573,900
7	01	01	2	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	24,508,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	24,508,000
7	01	01	2	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	4,770,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	4,770,000
7	01	01	2	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	4,280,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	4,280,000
7	01	01	2	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	4,015,900	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	4,015,900

7	01	01	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	111,307,100	Administrasi Umum Perangkat Daerah				111,307,100
7	01	01	2	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	30,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	30,000,000
7	01	01	2	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	36,670,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	36,670,000
7	01	01	2	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	10,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	10,000,000
7	01	01	2	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	8,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	8,000,000
7	01	01	2	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Kecamatan Cikajang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	10,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Kecamatan Cikajang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	10,000,000
7	01	01	2	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	6,637,100	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	6,637,100
7	01	01	2	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	10,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	10,000,000
7	01	01	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	78,950,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	78,950,000
7	01	01	2	05	Pengadaan Mebel (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	28,950,000	Pengadaan Mebel (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	28,950,000
7	01	01	2	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	50,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	50,000,000

7	01	01	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	34,102,800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	34,102,800
7	01	01	2	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	22,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	22,000,000
7	01	01	2	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	12,102,800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	12,102,800
7	01	01	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	275,972,700	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	275,972,700
7	01	01	2	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	16,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	16,000,000
7	01	01	2	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	16,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	16,000,000
7	01	01	2	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	243,972,700	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	243,972,700
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			100%	322,489,100	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			100%	322,489,100
7	01	02	2		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			100%	122,914,800	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			100%	122,914,800
7	01	02	2	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kecamatan Cikajang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	4,369,800	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kecamatan Cikajang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100%	4,369,800

7	01	02	2	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Cikajang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		118,545,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Cikajang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		118,545,000
								100%					100%	
7	01	02	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				199,574,300	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				199,574,300
								100%					100%	
7	01	02	2	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Cikajang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		199,574,300	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Cikajang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		199,574,300
								100%					100%	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				36,580,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				36,580,000
								100%					100%	
7	01	03	2		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				15,000,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				15,000,000
								100%					100%	
7	01	03	2	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kab. Garut,		15,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kab. Garut,		15,000,000
								100%					100%	
					Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Kecamatan Cikajang)	(PAD)	Cikajang, Cikajang			Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Kecamatan Cikajang)	(PAD)	Cikajang, Cikajang		
								100%					100%	
7	01	03	2		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				10,000,000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				10,000,000
								100%					100%	
7	01	03	2	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan Cikajang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		10,000,000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan Cikajang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		10,000,000
								100%					100%	
7	01	03	2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)				0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)				0
								100%					100%	
7	01	03	2	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Semua Kelurahan		0	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Semua Kelurahan		0
								100%					100%	
7	01	03	2		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				11,580,000	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				11,580,000
								100%					100%	

7	01	03	2	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Kecamatan Cikajang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		11,580,000	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Kecamatan Cikajang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		11,580,000
								100%					100%	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			100%	70,800,100	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			100%	70,800,100
7	01	04	2		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100%	70,800,100	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100%	70,800,100
7	01	04	2	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Cikajang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		30,850,100	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Cikajang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		30,850,100
								100%					100%	
7	01	04	2	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Garut,		39,950,000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Garut,		39,950,000
					dan Tokoh Masyarakat (Kecamatan Cikajang)		Cikajang, Cikajang		100%	dan Tokoh Masyarakat (Kecamatan Cikajang)		Cikajang, Cikajang		100%
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			100%	213,250,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			100%	213,250,000
7	01	05	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			100%	213,250,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			100%	213,250,000

7	01	05	2	01	Pembinaan Wawasan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kecamatan Cikajang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		13,250,000	Pembinaan Wawasan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kecamatan Cikajang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		13,250,000
								100%					100%	
7	01	05	2	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Kecamatan Cikajang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		200,000,000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Kecamatan Cikajang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		200,000,000
								100%					100%	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				20,000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				20,000,000
								100%					100%	
7	01	06	2		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				20,000,000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				20,000,000
								100%					100%	
7	01	06	2	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Kecamatan Cikajang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Garut, Cikajang, Semua Kelurahan		20,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Kecamatan Cikajang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Garut, Cikajang, Semua Kelurahan		20,000,000
								100%					100%	

Sumber : Pengolahan Data Kecamatan Cikajang Tahun 2023

Tabel 2.6
Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut Tahun 2023

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN															
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
7	01	01	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
7	01	01	2	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	
7	01	01	2	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		16,000,000	0	0	0	16,000,000	16,000,000	0	0	0	16,000,000	0	
7	01	01	2	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
7	01	01	2	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
7	01	01	2	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		5,000,000	0	0	0	5,000,000	2,880,000	0	0	0	2,880,000	(2.120.000)	

7	01	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1,630,505,120	0	0	0	1,630,505,120	1,571,838,735	0	0	0	1,571,838,735	(58.666.385)	
7	01	01	2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		1,615,505,120	0	0	0	1,615,505,120	1,561,575,035	0	0	0	1,561,575,035	(53.930.085)	
7	01	01	2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Dana Transfer Umum-Dana	Kab. Garut,		5,000,000	0	0	0	5,000,000	3,370,000	0	0	0	3,370,000	(1.630.000)	
					Keuangan SKPD (Kecamatan Cikajang)	Alokasi Umum	Cikajang, Cikajang													
7	01	01	2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		10,000,000	0	0	0	10,000,000	6,893,700	0	0	0	6,893,700	(3.106.300)	
7	01	01	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				6,000,000	0	0	0	6,000,000	4,250,000	0	0	0	4,250,000	(1.750.000)	
7	01	01	2	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		6,000,000	0	0	0	6,000,000	4,250,000	0	0	0	4,250,000	(1.750.000)	
7	01	01	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				41,508,000	0	0	0	41,508,000	37,573,900	0	0	0	37,573,900	(3.934.100)	
7	01	01	2	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		24,508,000	0	0	0	24,508,000	24,508,000	0	0	0	24,508,000	0	
7	01	01	2	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		6,000,000	0	0	0	6,000,000	4,770,000	0	0	0	4,770,000	(1.230.000)	
7	01	01	2	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		6,000,000	0	0	0	6,000,000	4,280,000	0	0	0	4,280,000	(1.720.000)	
7	01	01	2	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,015,900	0	0	0	4,015,900	(984.100)	
7	01	01	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah				106,767,700	7,902,300	0	0	114,670,000	103,404,800	7,902,300	0	0	111,307,100	(3.362.900)	

7	01	01	2	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	
7	01	01	2	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		36,670,000	0	0	0	36,670,000	36,670,000	0	0	0	36,670,000	0	
7	01	01	2	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
7	01	01	2	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	
7	01	01	2	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Kecamatan Cikajang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
7	01	01	2	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,000,000	0	0	0	10,000,000	6,637,100	0	0	0	6,637,100	(3.362.900)	
7	01	01	2	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		2,097,700	7,902,300	0	0	10,000,000	2,097,700	7,902,300	0	0	10,000,000	0	
7	01	01	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1,196,300	48,803,700	0	0	50,000,000	2,846,300	76,103,700	0	0	78,950,000	28.950.000		
7	01	01	2	05	Pengadaan Mebel (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		0	0	0	0	0	1,650,000	27,300,000	0	0	28,950,000	28.950.000	
7	01	01	2	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		1,196,300	48,803,700	0	0	50,000,000	1,196,300	48,803,700	0	0	50,000,000	0	
7	01	01	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			34,102,800	0	0	0	34,102,800	34,102,800	0	0	0	34,102,800	0		

7	01	01	2	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		22,000,000	0	0	0	22,000,000	22,000,000	0	0	0	22,000,000	0	
7	01	01	2	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		12,102,800	0	0	0	12,102,800	12,102,800	0	0	0	12,102,800	0	
7	01	01	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			46,558,200	229,414,500	0	0	275,972,700	46,558,200	229,414,500	0	0	275,972,700	0		
7	01	01	2	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		16,000,000	0	0	0	16,000,000	16,000,000	0	0	0	16,000,000	0	
7	01	01	2	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		16,000,000	0	0	0	16,000,000	16,000,000	0	0	0	16,000,000	0	
7	01	01	2	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		14,558,200	229,414,500	0	0	243,972,700	14,558,200	229,414,500	0	0	243,972,700	0	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			389,964,100	0	0	0	389,964,100	322,489,100	0	0	0	322,489,100	(67.475.000)		
7	01	02	2		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			175,089,800	0	0	0	175,089,800	122,914,800	0	0	0	122,914,800	(52.175.000)		
7	01	02	2	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kecamatan Cikajang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		9,689,800	0	0	0	9,689,800	4,369,800	0	0	0	4,369,800	(5.320.000)	

7	01	02	2	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Cikajang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		165,400,000	0	0	0	165,400,000	118,545,000	0	0	0	118,545,000	(46.855.000)	
7	01	02	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				214,874,300	0	0	0	214,874,300	199,574,300	0	0	0	199,574,300	(15.300.000)	
7	01	02	2	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Cikajang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		214,874,300	0	0	0	214,874,300	199,574,300	0	0	0	199,574,300	(15.300.000)	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				70,000,000	0	0	0	70,000,000	36,580,000	0	0	0	36,580,000	(33.420.000)	
7	01	03	2		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	
7	01	03	2	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	
					Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Kecamatan Cikajang)	(PAD)	Cikajang, Cikajang													
7	01	03	2		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
7	01	03	2	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan Cikajang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
7	01	03	2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)				30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	(30.000.000)	
7	01	03	2	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Cikajang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Semua Kelurahan		30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	(30.000.000)	
7	01	03	2		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				15,000,000	0	0	0	15,000,000	11,580,000	0	0	0	11,580,000	(3.420.000)	

7	01	03	2	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Kecamatan Cikajang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		15,000,000	0	0	0	15,000,000	11,580,000	0	0	0	11,580,000	(3.420.000)	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				83,000,100	0	0	0	83,000,100	70,800,100	0	0	0	70,800,100	(12.200.000)	
7	01	04	2		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				83,000,100	0	0	0	83,000,100	70,800,100	0	0	0	70,800,100	(12.200.000)	
7	01	04	2	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Cikajang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		33,000,100	0	0	0	33,000,100	30,850,100	0	0	0	30,850,100	(2.150.000)	
7	01	04	2	02		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		50,000,000	0	0	0	50,000,000	39,950,000	0	0	0	39,950,000	(10.050.000)	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				215,000,000				215,000,000	213,250,000				213,250,000		
7	01	05	2		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				215,000,000				215,000,000	213,250,000				213,250,000	(1.750.000)	

7	01	05	2	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kecamatan Cikajang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		15,000,000	0	0	0	15,000,000	13,250,000	0	0	0	13,250,000	(1.750.000)	
7	01	05	2	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Kecamatan Cikajang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang		200,000,000	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	
7	01	06	2		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	
7	01	06	2	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Kecamatan Cikajang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Garut, Cikajang, Semua Kelurahan		20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	

Sumber : Pengolahan Data Kecamatan Cikajang Tahun 2023

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cikajang Tahun 2023 dilakukan dengan mendasarkan pada adanya kondisi keuangan daerah yang berubah adanya penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran serta perubahan target kinerja. Dalam hal ini di hubungkan pula dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran perubahan renja Kecamatan Cikajang Tahun 2023, maka dirumuskan pula program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan di laksanakan pada tahun 2023, dengan memperhatikan pertimbangan antara lain:

1. Mempedomani perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 serta perubahan Renstra Kecamatan Cikajang tahun 2019-2024;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut;
3. Mendukung prioritas pembangunan daerah tahunan Kabupaten Garut
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan penggunaan sumber-sumber pendanaan yang terukur dalam rangka membayai pelaksanaan program secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Pelaksanaan program dan kegiatan yang di rencanakan harus dapat merespon isu-isu strategis pembangunan daerah.

Penyusunan perubahan renja pada rumusan program dan kegiatannya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan juga Renstra Kecamatan Cikajang Tahun 2019-2024 yang secara operasional dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Visi pembangunan daerah yang merupakan Visi Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih periode tahun 2019-2024 adalah: "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera".

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila,

diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.

2. Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
3. Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan daerah periode tahun 2019-2024 sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan Amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang.
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi local dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari keempat misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran :
 - a. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;
 - b. Meningkatkan harapan hidup masyarakat;
 - c. Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat;
 - d. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran;
 - e. Meningkatkan pengendalian jumlah penduduk
2. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran :
 - a. Meningkatkan pelayanan publik yang profesional dan amanah;

- b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
 - b. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;
 - c. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
 - d. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman;
 - e. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir
 4. Terwujudnya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
 5. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat;
 - b. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal;
 - c. Meningkatnya realisasi investasi daerah

Dalam upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, yang didukung pilar inovasi, kolaborasi, integritas dan profesionalisme. Untuk mendukung tujuan, sasaran dan tema pembangunan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023, yaitu :

PPD 1 : Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;

PPD 2 : Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi;

PPD 3 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;

PPD 4 : Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;

PPD 5 : Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;

PPD 6 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;

PPD 7 : Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur;

PPD 8 : Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Kecamatan Cikajang merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 terkait dengan pelaksanaan misi kedua yaitu mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih, dengan tujuan yang terkait adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, serta sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Adapun prioritas pembangunan daerah yang terkait adalah PPD 7 yaitu Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur.

Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021, Kecamatan Kabupaten Garut, dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dipimpin oleh Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Tujuan Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 200 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 72 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Cikajang Tahun 2019-2024 yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan, dengan indikator tujuan Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan berikut disajikan Rencana Kinerja Tujuan Kecamatan Cikajang Kabupaten

Garut yang mengacu kepada Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan Sasaran jangka menengah Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsinya serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Sasaran Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Perubahan Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan, dengan indikator sasaran Nilai SKM
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan, dengan indikator sasaran Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dengan indikator sasaran Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan, dengan indikator sasaran Nilai SAKIP Kecamatan.

Berikut disajikan Rencana Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut yang mengacu kepada Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 :

Tabel 3.1
Sasaran dan Indikator Sasaran Yang Mengacu Kepada Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai SKM)	B (80)	B (82)	B (82)	B (83)	B (84)
2	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	80	82	85	87	90
			Prosentase Desa	80	82	85	87	90

Pemerintahan Tingkat Kecamatan dan desa	pemerintahan Desa	berkinerja baik					
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP	C	CC	B	B	BB

Sumber : Renstra Perubahan Kecamatan Cikajang Tahun 2019-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Secara garis besar rumusan rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Cikajang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah bidang urusan pemerintahan sebanyak 1 bidang urusan yaitu unsur kewilayahan kecamatan.
2. Jumlah program sebanyak 6 program, yaitu :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
 - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
 - c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
 - d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
 - e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 - f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
3. Jumlah Kegiatan sebanyak 14 kegiatan,
4. Jumlah Sub Kegiatan sebanyak 38 Sub Kegiatan.
5. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif untuk rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2,820,994,435,- dengan kronologis dari pagu indikatif pada RKPD Tahun 2023 sebesar Rp. 4,951,126,100,- mengalami penyesuaian pada Renja sebesar Rp. 2.130.129.365,-.

Sedangkan pada APBD Murni Tahun 2023 dari Rp. 2.976.722.820,- pada Perubahan Renja Tahun 2023 mengalami penyesuaian menjadi sebesar Rp. 2.820.994.435,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Garut. Adapun rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan sebagaimana tertuang dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) tersaji pada table berikut :

Tabel 3.2
Perubahan Rencana Kerja
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Garut
Tahun 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	7.01.7.0 1.10.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan		100%	3.651.771.010,00	100%	100%	2,446,430,444	2.198.758.620	2.157.877.535	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.248.140.186	
1	7.01.7.0 1.10.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	5.661.000,00	100%	100%	56,000,000	46.000.000	43.880.000	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					20.000.000	
	7.01.7.0 1.10.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	5.661.000,00	100%	100%	15,000,000	15.000.000	15.000.000	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.000.000	
	7.01.7.0 1.10.01. 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100%	9.651.000,00	100%	100%	16,000,000	16.000.000	16.000.000	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.000.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100%		100%	100%	5,000,000			Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

	7.01.7.0 1.10.01. 2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD		100%	-	100%	100%	5,000,000	5.000.000	5.000.000	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						5.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD						5,000,000			Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						
	7.01.7.0 1.10.01. 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%	-	100%	100%	5,000,000	5.000.000	5.000.000	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						5.000.000
	7.01.7.0 1.10.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Cikajang)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	-	100%	100%	5,000,000	5.000.000	2.880.000	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						5.000.000
2	7.01.7.0 1.10.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan		100%	1.471.387.792,00	100%	100%	1,414,430,444	1.630.505.120	1.571.838.735	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						1.625.505.186
	7.01.7.0 1.10.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		100%	1.463.757.292,00	100%	100%	1,393,430,444	1.615.505.120	1,561,575,035	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						1.625.505.186

	7.01.7.0 1.10.01. 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Kecamatan Cikajang)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		100%		100%	100%	5,000,000	5.000.000	3.370.000	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.000.000,00	
	7.01.7.0 1.10.01. 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100%	7.630.500,00	100%	100%	10,000,000	10.000.000	6.893.700	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.000.000,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						6,000,000			Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
3	7.01.7.0 1.10.01. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan		100%		100%	100%	11,000,000	6.000.000	4.250.000	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.000.000	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						5,000,000			Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
	7.01.7.0 1.10.01. 2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		100%		100%	100%	6,000,000	6.000.000	4.250.000	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

4	7.01.7.0 1.10.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian di Kecamatan		100%	30.029.400,00	100%	100%	63,000,000	41.508.000	37.573.900	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					30.000.000,00
	7.01.7.0 1.10.01. 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		100%	30.029.400,00	100%	100%	46,000,000	24.508.000	24.508.000	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					25.000.000,00
	7.01.7.0 1.10.01. 2.05.02	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Kecamatan Cikajang)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		100%		100%	100%	6,000,000	6.000.000	4.770.000	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.000.000
	7.01.7.0 1.10.01. 2.05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kecamatan Cikajang)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		100%		100%	100%	6,000,000	6.000.000	4.280.000	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	7.01.7.0 1.10.01. 2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		100%	-	100%	100%	6,000,000	5.000.000	4.015.900	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						5,000,000			Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
5	7.01.7.0 1.10.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	163.923.700,00	100%	100%	138,000,000	114.670.000	111.307.100	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					127.245.000

7.01.7.0 1.10.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	6.593.000,00	100%	100%	30,000,000	30.000.000	30.000.000	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						50.000.000
7.01.7.0 1.10.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang Disediakan	100%	20.032.100,00	100%	100%	25,000,000	36.670.000	36.670.000	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						40.000.000
7.01.7.0 1.10.01. 2.06.05	Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	12.366.900,00	100%	100%	15,000,000	10.000.000	10.000.000	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						10.000.000
7.01.7.0 1.10.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	100%	7.385.000,00	100%	100%	8,000,000	8.000.000	8.000.000	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
7.01.7.0 1.10.01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	24.000.000,00	100%	100%	25,000,000	10.000.000	10.000.000	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						10.000.000,00
7.01.7.0 1.10.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	5.600.000,00	100%	100%	25,000,000	10.000.000	6.637.100	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

	7.01.7.0 1.10.01. 2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100%	-	100%	100%	10,000,000	10.000.000	10.000.000	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						7.245.000	
	7.01.7.0 1.10.01. 2.07	Pengadaan Barang Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	193.655.650,00	100%	100%	350,000,000	50.000.000	78.952.300	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						50.000.000,00	
	7.01.7.0 1.10.01. 2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100%	69.404.000,00	100%	100%		0	0	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
	7.01.7.0 1.10.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	49.853.300,00	100%	100%	50,000,000	50.000.000	50.000.000	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
	7.01.7.0 1.10.01. 2.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	1.790.458.138,00	100%	100%	200,000,000	0	0	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
	7.01.7.0 1.10.01. 2.05	Pengadaan Mebeul	Jumlah Pengadaan Mebeul		100%	74.398.350,00	100%	100%	100,000,000	0	28.952.300	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						50.000.000	
6	7.01.7.0 1.10.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	44.199.030,00	100%	100%	82,000,000	34.102.800	34.102.800	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						110.390.000,00	

		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat															15.000.000,00
	7.01.7.0 1.10.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		100%	14.551.330,00	100%	100%	22,000,000	22.000.000	22.000.000	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					30.000.000
	7.01.7.0 1.10.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100%		100%	100%		12.102.800	12.102.800	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	7.01.7.0 1.10.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100%	29.647.700,00	100%	100%	60,000,000			Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					15.000.000
7	7.01.7.0 1.10.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	38.511.600,00	100%	100%	332,000,000	275.972.700	275.972.700	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					280.000.000
	7.01.7.0 1.10.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		100%	14.610.500,00	100%	100%	16,000,000	16.000.000	16.000.000	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					15.000.000

	7.01.7.0 1.10.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kecamatan Cikajang)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		100%	16.141.500,00	100%	100%	16,000,000	16.000.000	16.000.000	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						15.000.000
	7.01.7.0 1.10.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100%		100%	100%	100,000,000	243.972.700	243.972.700	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						200,000,000			Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						250.000.000
2	7.01.7.0 1.10.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan		100%	222.391.200,00	100%	100%	327,500,000	389.964.100	389.964.100	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						355.000.000
8	7.01.7.0 1.10.02. 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan		100%	220.103.718,00	100%	100%	117,500,000	175.089.800	122.914.800	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						155.000.000

	7.01.7.0 1.10.02. 2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kecamatan Cikajang)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkaitn		100%	47.990.000,00	100%	100%	52,500,000	9.689.800	4.369.800	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					5.000.000,00
	7.01.7.0 1.10.02. 2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Monitoring Program BPNT, Kegiatan Penyelenggaraan Kepemudaan dan Olah Raga).		100%		100%	100%	65,000,000			Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					150.000.000
	7.01.7.0 1.10.02. 2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		100%	172.113.718,00	100%	100%		165.400.000	118.545.000	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					
9	7.01.7.0 1.10.02. 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		100%	25.000.000,00	100%	100%	210,000,000	214.874.300	199.574.300	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					200.000.000
	7.01.7.0 1.10.02. 2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan (Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan)		100%	25.000.000,00	100%	100%	10,000,000	214.874.300	199.574.300	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					

		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							200,000,000			Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						200.000.000
3	7.01.7.0 1.10.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Masyarakat Desa/ Kelurahan Yang Dapat Diberdayakan		100%	6.710.800,00	100%	100%	65,000,000	70.000.000	36.580.000		Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						72.610.000
10	7.01.7.0 1.10.03. 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	28.111.500,00	100%	100%	17,500,000	15.000.000	15.000.000		Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						30.000.000
	7.01.7.0 1.10.03. 2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		100%	16.727.500,00	100%	100%	17,500,000	15.000.000	15.000.000		Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						30.000.000
	7.01.7.0 1.10.03. 2.01.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		100%	11.384.000,00	100%	100%	17,500,000	10.000.000	10.000.000		Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
11	7.01.7.0 1.10.03. 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan		100%	-	100%	100%	17,500,000	10.000.000	10.000.000		Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						10.000.000

	7.01.7.0 1.10.03. 2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan Cikajang)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		100%	-	100%	100%	17,500,000			Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						10.000.000
1 2	7.01.7.0 1.10.03. 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		100%	-	100%	100%	30.000.000			Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						3.000.000
	7.01.7.0 1.10.03. 2.05.02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		100%	-	100%	100%	30.000.000			Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						3.000.000
1 3	7.01.7.0 1.10.03. 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat dan Kecamatan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan		100%	-	100%	100%	30,000,000	15.000.000	11.580.000	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						29.610.000
	7.01.7.0 1.10.03. 2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Laporan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		100%	-	100%	100%	30,000,000	15.000.000	11.580.000	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						29.610.000

4	7.01.7.0 1.10.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Penanganan Gangguan Trantibum		100%	46.078.800,00	100%	100%	105,000,000	83.000.100	70.800.100	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							35.000.000
1 4	7.01.7.0 1.10.04. 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%	46.078.800,00	100%	100%	60,000,000	83.000.100	70.800.100	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							35.000.000
	7.01.7.0 1.10.04. 2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		100%	31.728.500,00	100%	100%	45,000,000	33.000.100	30.850.100	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
	7.01.7.0 1.10.04. 2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		100%	14.350.300,00	100%	100%	15,000,000	50.000.000	39.950.000	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
1 3	7.01.7.0 1.10.04. 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100%		100%	100%	30,000,000			Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							

	7.01.7.0 1.10.04. 2.02.01	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Pungsiya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		100%		100%	100%	30,000,000			Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum						15,000,000			Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						15,000,000			Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
5	7.01.7.0 1.10.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat		100%	199.980.000,00	100%	100%	245,000,000	215.000.000	213.250.000	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						200.000.000
1 3	7.01.7.0 1.10.05. 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100%	199.980.000,00	100%	100%	245,000,000	215.000.000	213.250.000	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						200.000.000

	7.01.7.0 1.10.05. 2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		100%	25.089.500,00	100%	100%	30,000,000	15.000.000	13.250.000	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						15,000,000			Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
	7.01.7.0 1.10.05. 2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Kecamatan Cikajang) PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		100%		100%	100%	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
6	7.01.7.0 1.10.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Desa Berkinerja Baik		100%		100%	100%	48,000,000	20.000.000	20.000.000	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
																			50.000.000

1 4	7.01.7.0 1.10.06. 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100%		100%	100%	48,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						50,000,000
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa						24,000,000			Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa						24,000,000			Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
	7.01.7.0 1.10.06. 2.01.03	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		100%	-	100%	100%		20,000,000	20,000,000	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
					100%	4.146.045.028,00	100%	100%	3,236,930,444	2,976,722,820	2,820,994,435								2,960,750,186

Sumber : Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut Tahun 2023 disusun sebagai pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Strategis Kecamatan Cikajang Tahun 2019-2024. Dengan telah ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2023, maka Renja Kecamatan Cikajang Tahun 2023 perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian. Perubahan Renja Kecamatan Cikajang Tahun 2023 menitikberatkan pada penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran yang didasarkan atas hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi pencapaian indikator sasaran kegiatan, sasaran program, sasaran strategis maupun kesesuaiannya dengan perubahan rencana anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023. Dalam hal ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rencana kerja, khususnya yang terkait dengan anggaran, tidak sesuai atau kurang dari kebutuhan maka diharapkan bagi segenap aparatur di Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut untuk dapat mengimplementasikan prinsip efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran merupakan kemampuan dalam menggunakan anggaran seminimal mungkin untuk tetap dapat mencapai target program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan dalam implementasi rencana kerja selain menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya, baik dalam "kerangka regulasi" maupun dalam "kerangka anggaran" (*budget intervention*), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan setelah ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja ini adalah dilaksanakannya penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut Tahun 2023.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN